

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah yang mengelola negara dalam kaitannya dengan masalah keuangan mencakup dana yang cukup besar, sehingga pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan (Mabruri dan Winarna, 2010). Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah, dkk, 2009).

Di Indonesia ada tingkatan-tingkatan badan pengawasan, yang tugasnya mengawasi apakah dana yang ada terdistribusi dengan merata atau tidak. Badan pengawasan tersebut yaitu Auditor Pemerintah, yang terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005) dalam Effendy (2010), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005 dalam Effendy, 2010).

Menurut Boynton dalam Effendy (2010), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program

pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Selain adanya badan pengawas, ada juga standar yang melandasi terwujudnya audit sektor publik yang memadai. Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor “. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Tan dan Alison, 1999 dalam penelitian Maburri dan Winarna, 2010).

Secara umum auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari hasil audit inilah, kemudian auditor menarik sebuah kesimpulan dan menyampaikan kesimpulan tersebut kepada pemakai yang berkepentingan (Mardisar dan Sari, 2007).

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison, 1999).

Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka (Nugrahaningsih, 2005 dalam penelitian Alim dkk, 2007). Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005) dan semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya (Sukriah dkk, 2009).

Herliansyah dan Ilyas (2006) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan (*judgement*) yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Kualitas hasil audit dapat dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison, 1999 dalam Mardisar dan Sari, 2007).

Mabruri dan Winarna (2010) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah dengan menggunakan lima variabel independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, dan integritas auditor dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, dan integritas auditor

berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.

Alim, dkk (2007) meneliti tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi dan disimpulkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas hasil audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dimana kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan.

Sukriah, dkk (2009), meneliti tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan, kesimpulannya bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Penelitian ini merupakan replikasi yang mengkombinasikan penelitian yang dilakukan oleh Maburri dan Winarna (2010) dan Sukriah, dkk (2009) dengan waktu dan obyek yang berbeda namun alat analisis dan variabel yang digunakan adalah sama. Berdasarkan pertimbangan diatas serta banyaknya opini masyarakat tentang rendahnya kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah, maka penulis akan meneliti pengaruh faktor-faktor pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, serta kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan pada auditor dan pemeriksa di lingkungan pemerintahan pada Kantor Inspektorat Kota/Kabupaten atau Bawasda. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KOTA DAN KABUPATEN PEKALONGAN).”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
2. Apakah ada pengaruh independensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
3. Apakah ada pengaruh obyektivitas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
4. Apakah ada pengaruh integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
5. Apakah ada pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
2. Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
3. Pengaruh obyektivitas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
4. Pengaruh integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
5. Pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik mengenai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah (Studi pada Inspektorat tingkat Kota dan Kabupaten Pekalongan).
2. Sebagai subjek penelitian, hasil ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi kantor Inspektorat dalam mengoptimalkan kinerjanya, pengambilan keputusan serta dimanfaatkan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu.
3. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan, referensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam lima bab berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang menjelaskan metode penelitian yang terdiri atas: jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, pengujian data, dan analisis data.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil pelaksanaan penelitian, pengujian kualitas data, analisis data, hasil analisis data dan pembahasannya. Dalam bab ini juga dijelaskan dan dibandingkan pula hasil yang diperoleh dari penelitian yang sebelumnya.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.